

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Teguh Bakal Perbanyak Hunian Layak Huni untuk Warga Kurang Mampu

Palmerah, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan meningkatkan hunian layak huni yang aman dan terjangkau melalui penyediaan rumah susun sewa (Rusunawa).

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, penyediaan rusunawa itu ditujukan kepada warga yang belum memiliki rumah dan masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kami mengembangkan pembangunan rumah tidak layak huni melalui perbaikan rumah dan konsolidasi tanah bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan BPN (Badan Pertahanan Nasional)," kata Teguh dalam rapat pembahasan RAPBD 2025, di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

Program Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FRRR) diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga Jakarta untuk memiliki hunian layak.

"Terkait RW kumuh, kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan agar wilayah-wilayah kumuh di Jakarta terus berkurang," kata dia.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, anggota Fraksi Gerindra, Anggi Arando dan anggota Fraksi Golkar, Farah Savira meminta Pemprov Jakarta memberikan kemudahan bagi warga untuk memiliki rumah layak huni.

Anggi menuturkan, saat ini terdapat



Warta Kota/Yulianto

SUASANA RUSUNAWA — Suasana Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI menetapkan kriteria penghuni prioritas Rusun Pasar Rumput, yakni guru, TNI-POLRI berpangkat rendah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan rendah dengan dua kategori serta kisaran harga yang sudah kami hitung adalah Rp 1,1 juta dan paling mahal Rp 2,2 juta.

55 Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta. Mereka yang tinggal di wilayah ini belum memiliki hunian layak.

Untuk itu, Pemprov perlu mengoptimalkan penggunaan lahan-lahan di Jakarta melalui konsep mixed-use development.

"Konsep mixed-use development menjadi cara yang bisa ditempuh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan lahan," ucapnya.

Senada dengan Anggi, anggota Fraksi Partai Golkar Farah Savira menilai

masih ada sejumlah warga dengan KTP Jakarta yang belum terakomodir dalam rumah susun.

"Kelompok ini terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di bawah kolong tol hingga mereka yang berdomisili di area permukiman kumuh," kata Farah.

Farah menyebut, fenomena permukiman kumuh mencerminkan lingkungan hunian yang tidak mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak. (**Kompas.com**)